

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip serta kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung. Menariknya, ada basis sosiologis dalam partai politik salah satunya adalah ideologis sebagai dasar perjuangan yang kemudian diarahkan pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan, serta memperluas kekuasaan. Maknanya, partai politik merupakan organisasi politik yang berorientasi pada upaya untuk merebut, mempertahankan, serta menjalankan kekuasaan dalam bentuk kebijakan umum.¹

Fenomena partai politik di Indonesia mempunyai cerita panjang dan alasan kehadiran yang beragam setiap zamannya. Pertama, fase pra kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Kedua, fase demokrasi terpimpin. Ketiga, fase Orde Baru. Terakhir, fase reformasi.² Dalam setiap fase, partai politik tumbuh dan tenggelam, bermetamorfosis dan sintas */survival*. Titik berat dari pembahasan ini membahas

¹ Kebijakan umum merupakan produk tindakan pemerintah yang sifatnya mengikat, dalam arti pelaksanaannya ditegakkan dengan kewenangan memaksakan yang dimonopoli oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas buta aksara, menggalakkan program keluarga berencana, dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Silahkan rujuk Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. 2010; Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*. 2014; Solihin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan*. 2016.

² Sigit Pamungkas. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Institute Democracy and Welfarism. Yogyakarta. Hlm 146.

³ Fase pra kemerdekaan atau awal kemerdekaan merupakan masa pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Fase demokrasi terpimpin merupakan masa dimana kedudukan partai politik tidak terlalu berperan dalam berlangsungnya pemerintahan. Hal ini dikarenakan peranan partai politik sebagian besar diambil oleh militer, dilanjutkan dengan peraturan presiden yang dikenal dengan penyederhanaan partai politik, sehingga menyebabkan dominasi satu partai politik tertentu

tentang partai pada fase reformasi. Fase reformasi yang muncul setelah runtuhnya fase Orde Baru melahirkan euforia politik baru yang ditandai dengan kemunculan begitu banyak partai politik. Kemunculan partai politik di fase reformasi ini dimulai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintahan sehingga output yang dihasilkan dari kebijakan tersebut menyebabkan masyarakat beramai-ramai memasuki partai politik sebagai upaya untuk menjadi bagian penting dalam pesta demokrasi Indonesia.

Keterlibatan partai politik dalam pesta demokrasi Indonesia akan menjadi wadah yang benar-benar menerima serta membentuk kader yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan melalui proses rekrutmen yang baik. Rekrutmen menjadi landasan yang kuat dalam membangun sistem politik suatu negara, karena proses rekrutmen menghasilkan individu yang akan melaksanakan perannya di lembaga negara.

Partai politik memiliki tanggung jawab terhadap rekrutmen figur-figur calon pemimpin yang berkualitas dan mengutamakan aspirasi masyarakat. Karena itu, sebuah negara demokrasi mengharuskan adanya keterlibatan partai politik dalam menyukseskan kepemimpinan nasional. Maka sistem perekrutan calon-calon pemimpin yang dilakukan oleh partai politik menentukan kualitas kepemimpinan sebuah negara. Fungsi rekrutmen sangat penting bagi kelangsungan sistem politik

yakni PKI. Fase orde baru merupakan masa dimana partai politik dikonstruksi sedemikian rupa oleh penguasa untuk melayani orientasi pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Perlahan tapi pasti peran partai politik dibatasi dalam kehidupan politik dan kemudian dikendalikan oleh negara. silahkan rujuk Mimbar Yustita Vol.3 No.1 Juni 2019. Eksistensi Partai Politik di Indonesia Masa Pra dan Pasca Kemerdekaan; Putra, Okto Dellon Sunuraz. 2019. Lahirnya Pemerintahan Orde Baru. Pustekkom Kemdikbud. <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Orde%20Baru-BB/Topik-1.html>; Budi Winamo. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*.2007

sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.⁴

Proses rekrutmen politik sangat penting untuk menentukan kearah mana partai politik akan dibawa. Berbagai persoalan serta permasalahan yang melanda partai politik diawali dari perekrutannya, apabila kualitas kader bagus maka dapat dikatakan partai politik menghasilkan kader yang bagus pula, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab awal bagi partai politik yang dinamis dan kompleks.

Berbicara mengenai pola rekrutmen politik, setelah peneliti telusuri peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas terkait rekrutmen politik. Penelitian pertama, oleh Diah Anggraini yang meneliti mengenai Rekrutmen Kandidat Perempuan oleh Partai Politik (Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017).⁵ Penelitian ini menggunakan konsep rekrutmen politik dengan indikator menurut Norris yang terdiri dari 3 tahapan yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahapan pemilu. Penelitian kedua, oleh Nando Dei Rahman yang meneliti mengenai Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan.⁶ Penelitian ini menggunakan konsep rekrutmen politik dengan indikator menurut Rahat dan Hazan yang terdiri dari siapa kandidat yang di nominasikan, siapa tim penyeleksi, dimana kandidat tersebut diseleksi, dan bagaimana kandidat tersebut diputuskan.

⁴ Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Grasindo. Hlm 105

⁵ Diah Anggraini. 2019. Rekrutmen Kandidat Perempuan oleh Partai Politik (Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017). *Skripsi*. Padang Universitas Andalas

⁶ Nando Dei Rahman. 2021. Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. Padang Universitas Andalas

Penelitian ketiga, oleh Heby Hara Octabrian yang meneliti mengenai Rekrutmen Bakal Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia DPW Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.⁷ Penelitian ini menggunakan indikator menurut Pippa Noris yang terdiri dari siapa kandidat yang di nominasikan, siapa tim penyeleksi, dimana kandidat tersebut diseleksi, dan bagaimana kandidat tersebut diputuskan. Penelitian keempat, oleh Nora Lidyana Putri yang meneliti mengenai Proses Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera pada Lembaga Dakwah Kampus di Perguruan Tinggi Universitas Andalas 2018.⁸ Penelitian ini menggunakan konsep rekrutmen partai politik dengan menggunakan indikator menurut Michael Rush dan Philip Althoff, yang mana pada penelitian penggunaan konsep rekrutmen politik ditekankan pada pengembangan organisasi yang diproyeksikan pada lulusan untuk menjadi kader PKS.

Dari beberapa penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, dapat kita ketahui bahwa partai politik dalam memilih kadernya melalui proses rekrutmen politik. Penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu belum menjelaskan secara rinci dan signifikan mengenai pola rekrutmen politik dengan menggunakan teori Rush dan Althoff, sedangkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas menggunakan teori yang berbeda dengan teori yang peneliti gunakan.

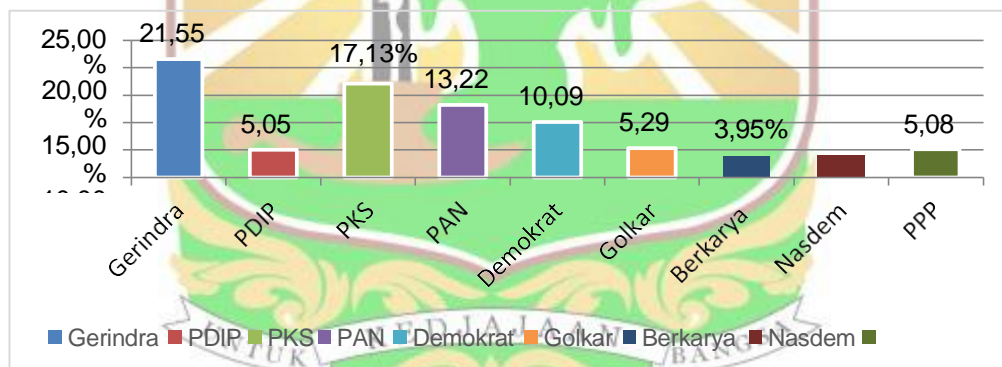
⁷ Heby Hara Octabrian. 2021. Rekrutmen Bakal Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia DPW Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. *Skripsi*. Padang Universitas Andalas

⁸ Nora Lidyana Putri. 2022. Proses Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera pada Lembaga Dakwah Kampus di Perguruan Tinggi Universitas Andalas 2018. *Skripsi*. Padang Universitas Andalas

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan Pemilu, partai politik yang menjadi peserta dalam persaingan untuk meraih kekuasaan dan kemenangan, dituntut agar mampu bersaing dengan kemampuan dan keunggulan. Hal itu dapat diperoleh jika sebuah partai politik melakukan rekrutmen yang baik untuk calon anggota legislatif. Hal ini dimaksudkan agar sebuah partai mendapat tempat bagi para pemilihnya.

Pada Pemilu Legislatif 2019, perolehan kursi PDIP memperlihatkan tren yang negatif, karena PDIP tidak mendapatkan angka yang tinggi pada perolehan kursi legislatif. Sebagai partai yang dikenal sudah lama berdiri, perolehan kursi pada Pemilu 2019 dapat dikatakan sangat sedikit dibandingkan partai lain yang berdiri setelah PDIP. Selain itu, persentase suara yang diperoleh PDIP dalam Pemilu legislatif Kota Padang hanya 5,05%. Untuk persentase suara lebih jelas, dilihat pada Grafik 1.3 yang disajikan berikut ini:



Grafik 1. 1 Persentase Suara PDIP Berdasarkan Daerah Pemilihan di Kota Padang Tahun 2019

Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2019

Berdasarkan Grafik 1.1 di atas, Partai Gerindra memenangkan perolehan suara dengan perolehan 21,55 persen suara, kemudian diurutkan kedua PKS dengan perolehan 17,13 persen suara, diurutkan ketiga PAN dengan perolehan 13,22

persen suara, diurutan keempat Partai Demokrat dengan perolehan 10,09 persen suara, diurutan kelima Partai Golkar dengan perolehan 5,29 persen suara, diurutan keenam PPP dengan perolehan 5,08 persen suara, diurutan ketujuh PDIP dengan perolehan 5,05 persen suara, diurutan kedelapan Partai Nasdem dengan perolehan 4,07 persen suara dan diurutan kesembilan Partai Berkarya dengan perolehan 3,95 persen suara. Dari data persentase suara tersebut, PDIP menempatkan posisi 3 dari bawah, yang mana bahwa PDIP mendapatkan suara yang tidak banyak dibandingkan partai besar lainnya.

Tabel 1. 1 Perbandingan Kursi Pada Pileg 2014 dan 2019

No.	Tahun 2014	Tahun 2019
1.	Wismar Panjaitan	Wismar Panjaitan
2.	Iswanto Kwara	Iswanto Kwara
3.	Nuzul Putra	Christian Rudy Kurniawan

Data berdasarkan KPU Kota Padang

PDIP merupakan salah satu partai besar yang memiliki masa yang cukup banyak. Namun, itu tidak berlaku untuk di daerah Sumatera Barat, terutama Kota Padang. Dalam Pemilu Legislatif tahun 2019, PDIP yang menyandang gelar partai besar itu harus menerima sedikitnya perolehan suara serta perolehan kursi di Sumatera Barat dalam penetapan calon anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024. Berdasarkan tabel di atas yang mana dalam pemilihan tersebut PDI Perjuangan hanya memperoleh 3 kursi pada pemilihan legislatif pada tahun 2014 dan juga 3 kursi pada tahun 2019, serta 2 orang diantaranya adalah *incumbent*.

Hasil pengamatan oleh pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi, bahwa rendahnya suara PDIP di Sumbar dikarenakan pengurus PDIP gagal memberikan figur-figur yang dirasa mampu mempresentasikan kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga PDIP kalah bersaing dengan kader partai

lain dan membuat PDIP sulit membangun kepercayaan politik masyarakat Sumbar.⁹ Kemudian berdasarkan Lembaga Survei dan Konsultan Spektrum Politika merilis survei persepsi masyarakat Sumatera Barat terhadap PDIP dengan menanyakan secara acak kepada masyarakat yang terdaftar sebagai DPT Pemilu 2019. Temuan survei ini menyebut bahwa lemahnya figur dan aktivitas politik PDIP tidak sesuai dengan masyarakat Sumbar.¹⁰

Merujuk dari hasil survei dari Lembaga Survei dan Konsultan Spektrum Politika, terdapat tujuh faktor penyebab PDI Perjuangan masih rendah di Sumatera Barat. Diantaranya yaitu pertama, aktor-aktor PDI Perjuangan kurang mendekatkan diri kepada masyarakat Sumatera Barat. Kedua, lemahnya figur PDI Perjuangan di Sumatera Barat terbukti 60,3 persen masyarakat Sumatera Barat merasa bahwa setiap program yang dilakukan oleh PDI Perjuangan tidak senada dengan keyakinan masyarakat. Sehingga masyarakat Sumatera Barat dengan mayoritas Islam merasa tidak terwakili dengan partai ini. Ketiga, pemberitaan mengenai sikap PDI Perjuangan yang bersumber dari media cetak ataupun media *online* tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Sumatera Barat. Keenam, gagasan, sikap, dan perilaku dari elit PDI Perjuangan tingkat pusat dinilai cukup bermasalah sehingga masyarakat menilai bahwa partai ini tidak dapat mewakili keinginan masyarakat.

Ketua PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyatakan keheranannya terkait rendahnya dukungan masyarakat Sumatera Barat kepada partainya. Megawati

⁹ [Republika.co.id](https://www.republika.co.id). 2020, 3 September. Pengamat Paparkan Alasan PDIP Kurang Digemari di Sumbar. <https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/qg2ft328>

¹⁰ [Republika.co.id](https://www.republika.co.id). 2020, 11 Oktober. PDIP Sulit Diterima di Sumbar karena Komunikasi Elit Lemah. <https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/qi1b5g354>

mengaku kesulitan untuk memenangkan provinsi dan merebut hati masyarakat Sumatera Barat. Pada saat pengumuman calon kepala daerah yang mengukung partainya di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020, Megawati berkata:

“Kalau saya melihat Sumbar itu, saya pikir kenapa rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDIP. Kalau kita ingat sejarah bangsa, banyak orang dari kalangan Sumbar yang menjadi nasionalis yang waktu itu kerja sama dengan Bung Karno seperti Bung Hatta yang sebenarnya datang dari Sumbar.”¹¹

Ketua DPC PDI Perjuangan, Albert Hendra Lukman, mengatakan pada Pemilu Legislatif 2014 partainya mendudukkan tiga kader di DPRD Padang. Untuk ke depannya PDI Perjuangan tentu ingin lebih baik dan ingin di setiap daerah pemilihan ada satu kader yang duduk. Albert juga mengatakan bahwa optimis dengan target tersebut, terutama untuk daerah pemilihan dua dan tiga di Kota Padang yang belum kami taklukkan pada Pileg 2014. PDI Perjuangan merupakan partai kader sehingga calon anggota legislatif adalah para kader yang bekerja untuk membesarkan partai.¹²

Alex Hendra Lukman juga menambahkan bahwa gagalnya PDI Perjuangan mendulang suara di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang disebabkan karena masyarakat Kota Padang sejak dahulu merupakan loyalis dari Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.¹³

¹¹JawaPos.com. 2020, 2 September. Megawati bingung kenapa warga Sumbar tak suka PDIP <https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/09/2020/megawati-bingung-kenapa-warga-sumbar-tak-suka-pdip/>

¹²PDIP mendaftarkan ke KPU <https://www.google.co.id/amp/s/hariansinggalang.co.id/pdip-mendaftar-ke-kpu-padang/%3famp>

¹³ Alvin Gumelar Hanevi, Irwan, Azwar Ananda, dan Susi Fitria Dewi. 2022. Persepsi masyarakat Kota Padang terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Studi pada Masyarakat Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan Kelurahan Lolong Belanti). *Journal of Civic Education* 4 No.2

Berdasarkan data yang peneliti paparkan di atas, penelitian berasumsi bahwa pola rekrutmen yang dijalankan PDIP pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Padang masih belum baik lantaran figur-figur calon PDI Perjuangan tidak sesuai dengan masyarakat Kota Padang yang mana masyarakat Kota Padang dengan mayoritas Islam merasa tidak terwakilkan dengan partai ini. Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang pola rekrutmen yang dijalankan oleh PDI Perjuangan Kota Padang. Beranjak dari yang sudah peneliti jelaskan, maka rumusan penelitian ini adalah bagaimana pola rekrutmen politik PDIP pada Pemilu Legislatif di Kota Padang tahun 2019?

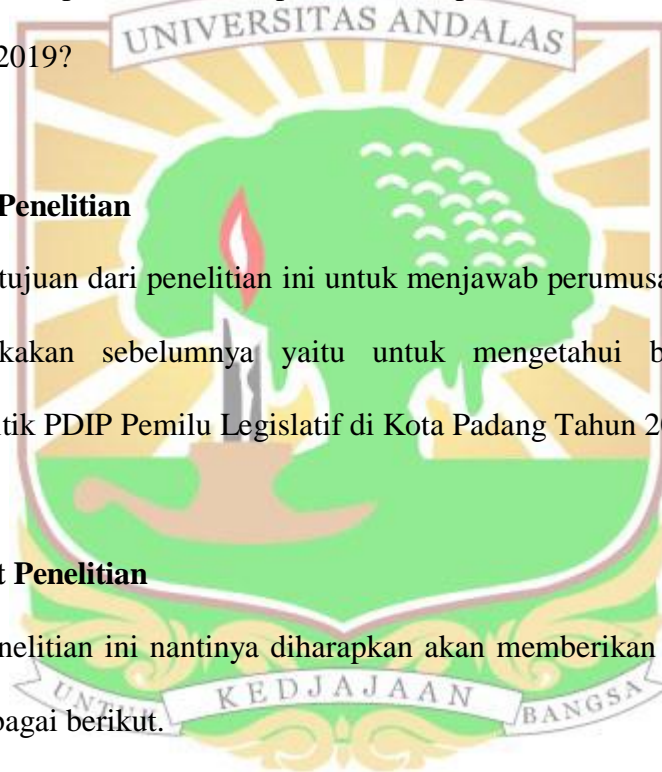
1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjawab perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen politik PDIP Pemilu Legislatif di Kota Padang Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang faktor yang menyebabkan pola rekrutmen PDIP Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, serta bermanfaat



untuk mengembangkan kemampuan dan menuliskan karya ilmiah di lapangan berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi dari ilmu sosial dan ilmu politik.

2. Secara Akademis, dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya karena penelitian merupakan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu dalam bidang politik serta pembelajaran untuk penelitian mahasiswa lainnya.
3. Secara praktis, digunakan oleh objek terkait untuk mengevaluasi serta memprediksi langkah partai kedepannya.

